

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi, dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran utama yaitu untuk kepentingan organisasi. Teori stewardship ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah tersusun dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principals, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya (Donaldson dan Davis, 1989,1991).

Teori stewardship dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yaitu pada hakikatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi pemerintah dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas principals dan manajemen. Teori stewardship dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan profit lainnya (Wahida 2015). Dengan demikian jika pihak principal dan agent memilih hubungan kepengurusan (stewardship), hasilnya adalah hubungan yang benar-benar penting yang dirancang untuk memaksimalkan potensi kerja kelompok, demikian pula halnya pihak principal memilih untuk menciptakan suatu situasi kepengurusan yang berorientasi pada pemberdayaan dan pelimpahan wewenang yang cenderung menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Daerah kabupaten/kota berstatus sebagai daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah daerah kabupaten/kota, mempunyai kewajiban untuk menyajikan kualitas laporan keuangan yang berkualitas agar dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjadi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah wajib memberikan laporan pertanggungjawaban yang tertuang dalam APBD kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK.

Penerapan teori Stewardship dikaitkan dengan penelitian ini dapat menjelaskan keberadaan pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk dapat menjadi wadah aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan publik dengan baik, dan dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang telah diamankan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dan tujuan ekonomi terpenuhi secara maksimal. Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards menggunakan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern agar dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas-entitas pelaporan yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari :

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah;

- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
- d. Satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dijelaskan pula bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjam;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.1.2.3 Komponen Laporan Keuangan

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan SAL (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang di cakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam

Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan arus kas menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan keuangan. Adapun laporan keuangan yang dimaksud yaitu Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, juga berisi ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.2.4 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, paragraf 35-40 dapat diketahui bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.

2. Andal

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kualitas Laporan Keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dengan memenuhi

karakteristik kualitatifnya berupa relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2.1.3 Sistem Pengendalian Intern

2.1.3.1 Definisi Sistem Pengendalian Intern

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat diketahui bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

Berdasarkan uraian diatas, Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berguna untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Pengendalian intern melekat disepanjang kegiatan tetapi hanya memberikan keyakinan memadai bukan keyakinan yang mutlak. Sumber daya manusia yang digunakan akan diawasi dan diarahkan oleh suatu sistem pengendalian internal sebuah organisasi.

2.1.3.2 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Inten

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

1. Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang memengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas (Indra, 2011:11). Lingkungan Pengendalian diwujudkan melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika.
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Kepemimpinan yang kondusif.
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko adalah identifikasi dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk

menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Pengendalian Intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Pimpinan Instansi Pemerintah atau evaluator harus berkonsentrasi pada penetapan tujuan instansi, pengidentifikasian dan analisis risiko serta pengelolaan risiko pada saat terjadi perubahan. Penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip prinsip akuntansi yang berlaku umum. Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi (Indra, 2011:12).

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu Instansi Pemerintah dapat berbeda dengan yang diterapkan pada Instansi Pemerintah lain, hal tersebut dapat disebabkan karena adanya perbedaan visi, misi, dan tujuan, lingkungan dan cara beroperasi, tingkat kerumitan organisasi, sejarah atau latar belakang serta budaya, dan risiko yang di hadapi. Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. Kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen

untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif (Indra, 2011:12).

Kegiatan pengendalian terdiri atas :

1. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
2. Pembinaan sumber daya manusia.
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
4. Pengendalian fisik atas aset.
5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.
6. Pemisahan fungsi.
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi adalah pengidentifikasi, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka. Kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan mencegah terjadinya salah saji potensial terhadap pernyataan manajemen dalam laporan keuangan (Indra, 2011:12). Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan lainnya di seluruh Instansi Pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang

bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Proses penilaian kualitas kinerja dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu (Indra, 2011:13). Dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasn intern pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang

memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi yang memiliki beberapa unsur untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu guna membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini yang berkaitan dengan variabel yang akan di uji. Variabel tersebut yaitu Sistem Pengendalian Intern yang terdiri dari Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko(X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4) dan Pemantauan (X5), terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y). Penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhamad Ghiffari Alif (2019)	Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih	Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih. Indipenden : X1 :Standar Akuntansi Pemerintahan X2 : Sistem Pengendalian intern Pemerintah X3: Sistem Informasi Keuangan	Secara Parsial penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah,sistem informasi keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Prabumulih Secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan sistem informasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

				kota Prabumulih.
2.	Khoirina Kencana Ningrum (2018).	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	<p>Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.</p> <p>Independen : X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 : Sistem Pengendalian Intern</p>	<p>Secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, sedangkan Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.</p>
3.	Corolus Askikarno P (2019)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa)	<p>Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah</p> <p>Independen : X1 : Lingkungan Pengendalian X2 : Penilaian Risiko X3 : Kegiatan Pengendalian X4 : Informasi dan Komunikasi X5 : Pemantauan</p>	<p>Secara parsial penerapan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan penerapan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>

4.	Meri Susanti (2020)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Badan Layanan Umum Daerah (Studi Pada Puskesmas Se-Kabupaten Ponorogo)	Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan. Independen : X1 : Lingkungan Pengendalian Risiko X2 : Penilaian Kegiatan Pengendalian X3 : Informasi dan Komunikasi X4 : Pemantauan	Secara parsial, penerapan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan berpengaruh terhadap kualitas Pelaporan keuangan Pemerintah Badan Layanan Umum Daerah (Studi Pada Puskesmas Se-Kabupaten Ponorogo). Secara simultan penerapan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan berpengaruh terhadap kualitas Pelaporan keuangan Pemerintah Badan Layanan Umum Daerah (Studi Pada Puskesmas Se-Kabupaten Ponorogo).
5.	Ninda Amarini (2018)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan. Independen : X1 : Lingkungan Pengendalian Risiko X2 : Kegiatan Pengendalian X3 : Informasi dan Komunikasi X4 : Pemantauan	Secara parsial, penerapan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan namun kegiatan pengendalian berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan

				keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. Secara simultan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.
6.	BRM. Suryo Triono, Septiana Novita Dewi	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>Independen : X1 : Lingkungan Pengendalian X2 : Penilaian Risiko X3 : Kegiatan Pengendalian X4 : Informasi dan Komunikasi X5 : Pemantauan</p>	Secara parsial lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan teknologi, dan pemantauan masing masing berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, namun kegiatan pengendalian berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil Uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%), maka terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
7.	Yunita Sari (2017).	Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu)	<p>Dependen : Y : Kualitas Pelaporan Keuangan</p> <p>Independen : X1 : Lingkungan Pengendalian</p>	Secara parsial kegiatan pengendalian dan pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan

			<p>X2 : Penilaian Risiko X3 : Kegiatan Pengendalian X4 : Informasi dan Komunikasi X5 : Pemantauan</p>	<p>Umum (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu) namun lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu)</p>
8.	Tuti Herwati (2014)	<p>Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)</p>	<p>Dependen : Y: Kualitas Laporan Keuangan. Independen : X1 : Lingkungan Pengendalian X2 : Penilaian Risiko X3 : Kegiatan Pengendalian X4 : Informasi dan Komunikasi X5 : Pemantauan</p>	<p>Secara parsial, Terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, dan Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan, namun terdapat pengaruh tidak signifikan antara Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur) Secara simultan, terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan terhadap</p>

				Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur).
9.	Ni Made Sudiarianti (2015)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Independen : X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Sistem Pengendalian Intern X3 : Standar Akuntansi Pemerintah	Kompetensi SDM berpengaruh positif pada penerapan SPIP, SAP dan kualitas LKPD Pemkab Tabanan. Penerapan SPIP dan SAP berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemkab Tabanan. Kompetensi SDM berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemkab Tabanan melalui penerapan SPIP dan SAP.
10.	Heni Sundari dan Sri Rahayu (2019).	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018).	Dependen : Y : Kualitas Laporan Keuangan Independen : X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Teknologi Informasi X3 : Sistem Pengendalian Intern	Secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia, pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018.

Sumber : Data yang diolah, 2022

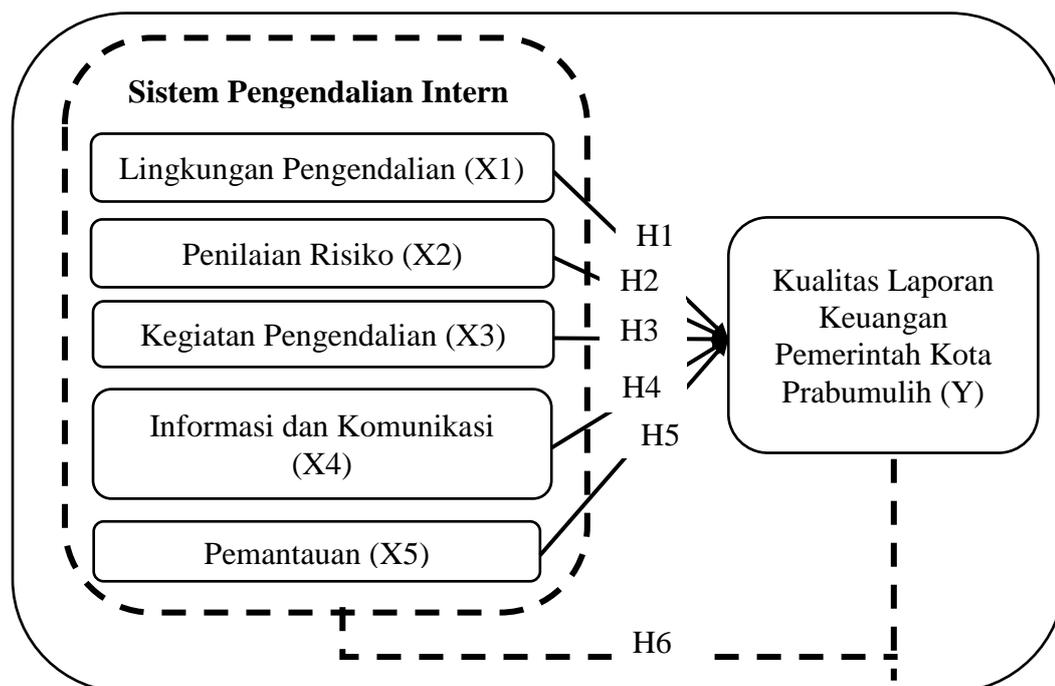
Dalam penelitian ini, Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen serta variabel independennya yaitu Penerapan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada

variabel independen, waktu dan objek penelitian yaitu Pemerintah Kota Prabumulih.

2.3 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam bukunya Business Research, 1992 dalam (Sugiyono, 2019:95) mengemukakan bahwa, kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan landasan teori dan masalah maka penulis akan mengembangkan kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih

Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang memengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas (Indra, 2011:11).

Dengan tidak adanya Lingkungan Pengendalian, maka laporan keuangan tidak akan handal dan baik, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Lingkungan Pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian dengan tidak adanya lingkungan pengendalian juga maka sistem pengendalian intern tidak berjalan maksimal karena lingkungan pengendalian merupakan unsur dari Sistem Pengendalian Intern dimana unsur Sistem Pengendalian Intern berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Sehingga apabila Lingkungan pengendalian yang merupakan unsur dari Sistem Pengendalian Intern berjalan dengan baik dan benar, maka Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan akan berkualitas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Carolus Askikarno Palalangan (2019) dan Meri Susanti (2020) menunjukkan bahwa Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal yang disampaikan diatas, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini berdasarkan teori yang dikemukakan adalah:

H1: Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih.

2.4.2 Pengaruh Penilaian Risiko Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih

Penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi (Indra, 2011:12).

Dengan tidak adanya Penilaian Risiko, maka laporan keuangan tidak akan handal dan baik, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan

resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dengan tidak adanya penilaian risiko juga maka sistem pengendalian intern tidak berjalan maksimal karena penilaian risiko merupakan unsur dari Sistem Pengendalian Intern dimana unsur Sistem Pengendalian Intern berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Sehingga apabila penilaian risiko yang merupakan unsur dari Sistem Pengendalian Intern berjalan dengan baik dan benar, maka Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan akan berkualitas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tuti Herawati (2014) dan Ninda Armarini (2018), menunjukkan bahwa penilaian risiko berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal yang disampaikan diatas, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini berdasarkan teori yang dikemukakan adalah:

H2: Penilaian Risiko berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih.

2.4.3 Pengaruh Kegiatan Pengendalian Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih.

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif (Indra, 2011:12).

Dengan tidak adanya Kegiatan Pengendalian, maka laporan keuangan tidak akan handal dan baik, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif, dengan tidak adanya kegiatan pengendalian juga maka sistem pengendalian intern tidak berjalan maksimal karena kegiatan pengendalian merupakan unsur dari Sistem Pengendalian Intern dimana unsur Sistem Pengendalian Intern berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Sehingga apabila kegiatan pengendalian yang merupakan unsur dari Sistem Pengendalian Intern berjalan dengan baik dan benar, maka Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan akan berkualitas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita Sari (2017) dan BRM. Suryo Triono dan Septiana Novita Dewi (2020), menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal yang disampaikan diatas, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini berdasarkan teori yang dikemukakan adalah:

H3: Kegiatan Pengendalian berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih.

4.3.4 Pengaruh Informasi dan Komunikasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih

Kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan mencegah terjadinya salah saji potensial terhadap pernyataan manajemen dalam laporan keuangan (Indra, 2011:12). Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Dengan tidak adanya Informasi dan Komunikasi, maka laporan keuangan tidak akan handal dan baik, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus, dengan tidak adanya informasi dan komunikasi juga maka sistem pengendalian intern tidak berjalan maksimal karena informasi dan komunikasi merupakan unsur dari Sistem Pengendalian Intern dimana unsur Sistem Pengendalian Intern berfungsi sebagai

pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Sehingga apabila informasi dan komunikasi yang merupakan unsur dari Sistem Pengendalian Intern berjalan dengan baik dan benar, maka Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan akan berkualitas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Carolus Askikarno Palalangan (2019) dan Tuti Herawati (2014), menunjukkan bahwa informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal yang disampaikan diatas, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini berdasarkan teori yang dikemukakan adalah:

H4: Informasi dan Komunikasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih.

2.4.5 Pengaruh Pemantauan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih

Proses penilaian kualitas kinerja dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu (Indra, 2011:13). Dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam melaksanakan tugas.

Dengan tidak adanya Pemantauan, maka laporan keuangan tidak akan handal dan baik, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Proses penilaian kualitas kinerja dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu. Dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya, dengan tidak adanya pemantauan juga maka sistem pengendalian intern tidak berjalan maksimal karena pemantauan merupakan unsur dari Sistem Pengendalian Inten dimana unsur Sistem Pengendalian Intern berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Sehingga apabila pemantauan yang merupakan unsur dari Sistem Pengendalian Intern berjalan dengan baik dan benar, maka Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan akan berkualitas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meri Susanti (2020) dan Yunita Sari (2017), menunjukkan bahwa pemantauan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal yang disampaikan diatas, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini berdasarkan teori yang dikemukakan adalah:

H5: Pemantauan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih.

4.4.6 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat diketahui bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan tidak adanya Sistem Pengendalian Intern, maka hasil akhir laporan keuangan tidak akan handal dan baik, dimana pada Sistem Pengendalian Intern terdapat unsur yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Sehingga apabila pemantauan yang merupakan unsur dari Sistem Pengendalian Intern berjalan dengan baik dan benar, maka Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan akan berkualitas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghiffari Alif (2019) dan Ni Made Sudiariati (2015), menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal yang disampaikan diatas, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini berdasarkan teori yang dikemukakan adalah:

H6: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih.